

# Pencegahan Penyalahgunaan Bantuan Sosial dalam Masa Pemilu dan Pemilihan

oleh:

**Dr. Ahmad Adib Susilo, S.E., M.Sc., Ak., CGAE, CA, CSFA., ERMCP., CGCAE**  
**Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI**



# AGENDA

1

KONSEP  
BANSOS

3

RISIKO  
DAN  
MITIGASI  
RISIKO

5

KESIMPULAN

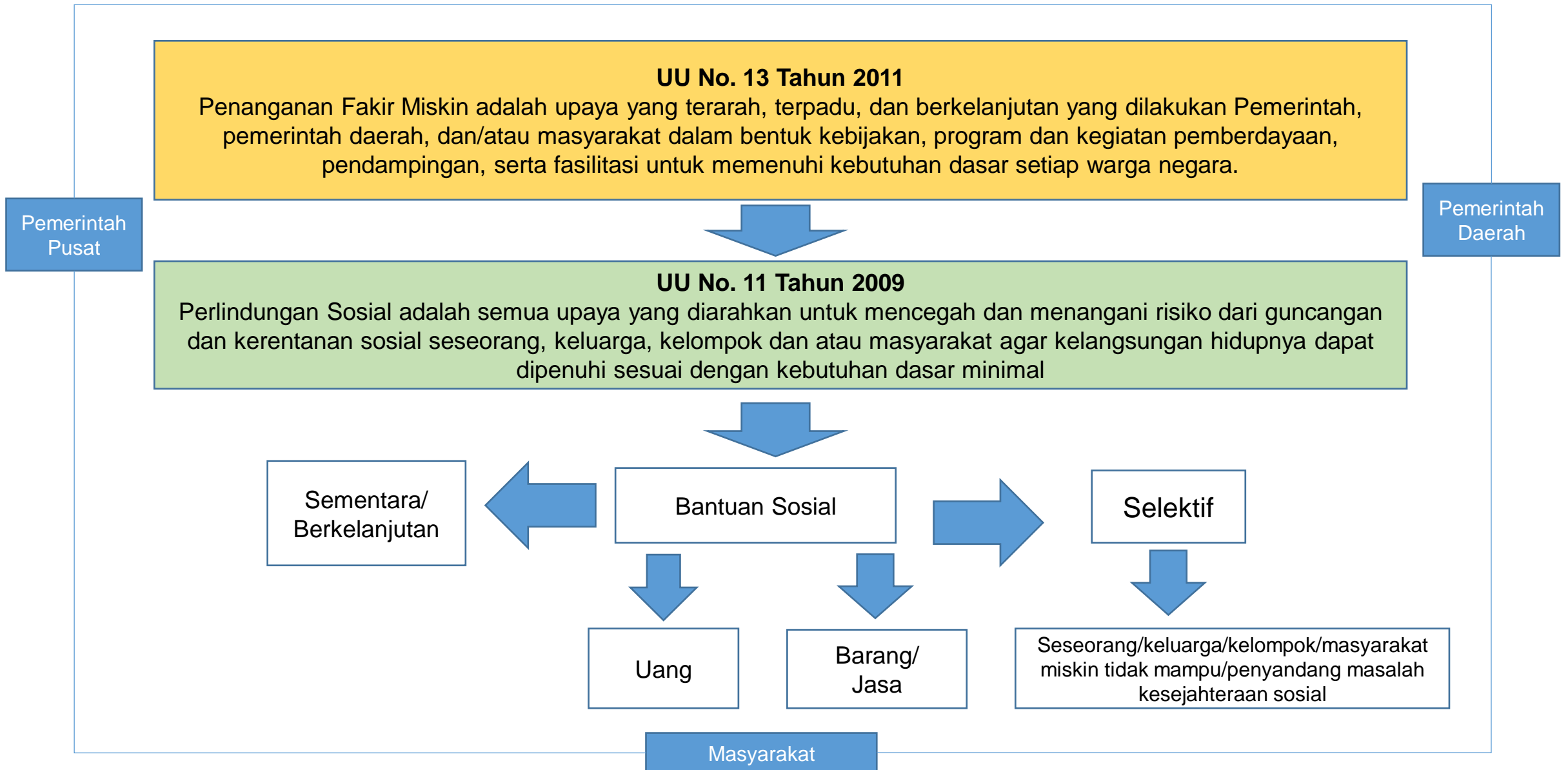
GAMBARAN  
UMUM  
PERLINDUNGAN  
SOSIAL  
TAHUN 2023  
DAN 204

2

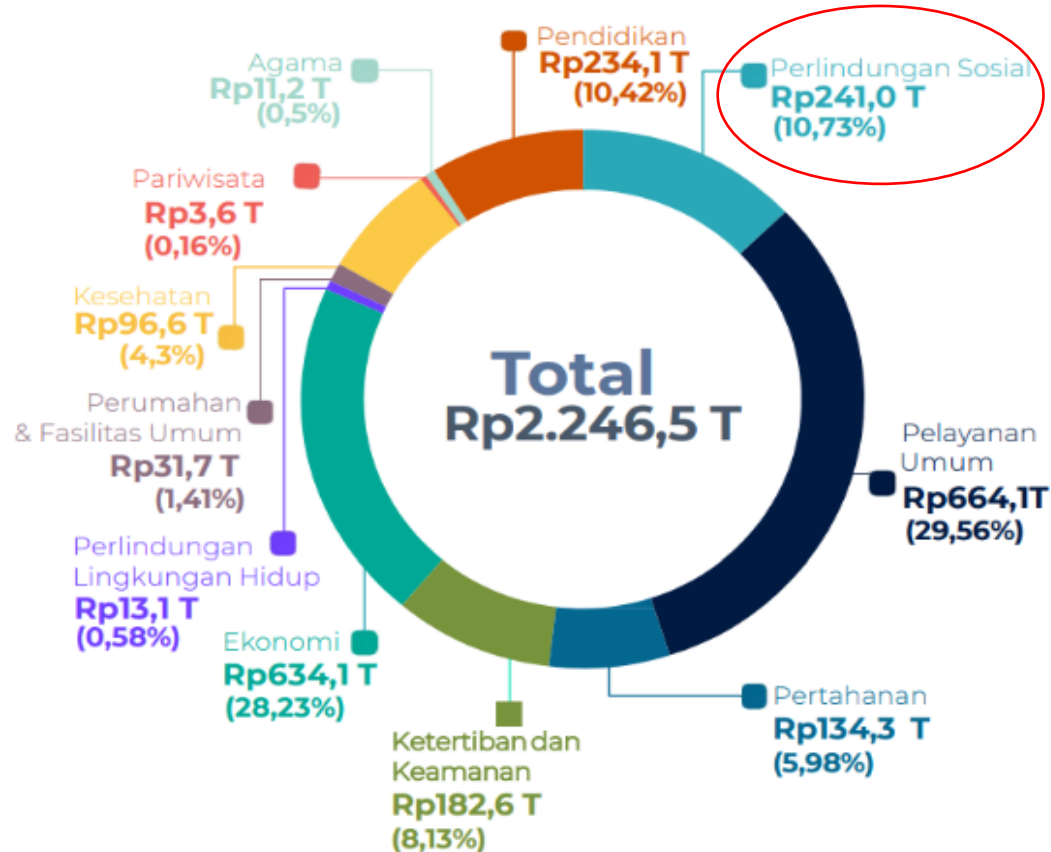
PERMASALAHAN  
DAN STRATEGI  
PENCEGAHAN

4

# KONSEP BANTUAN SOSIAL



# Gambaran Umum APBN Bidang Perlinsos Tahun 2023



## Tantangan:

- ✓ Akurasi data untuk penargetan program yang belum sepenuhnya akurat.
- ✓ Fragmentasi antar program perlinsos yang belum tersinergi dengan baik.
- ✓ Pemberian program yang belum sepenuhnya disertai dengan kebijakan graduasi kemiskinan yang terukur.
- ✓ Perlunya penguatan program guna menghasilkan sistem perlinsos yang responsif terhadap krisis di masa depan

## Arah Kebijakan:

- ✓ Perbaikan data dan penargetan program perlinsos melalui pembangunan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
- ✓ Tantangan Perlinsos Penguatan graduasi kemiskinan melalui penguatan program pemberdayaan.
- ✓ Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
- ✓ Penguatan perlinsos sepanjang hayat termasuk penguatan program bagi lansia dan disabilitas.
- ✓ Dukungan pelaksanaan perlinsos yang adaptif terhadap krisis.



# Gambaran Umum Bidang Perlinsos Tahun 2024

## Bantuan Sosial Jumbo di Tahun Politik

Anggaran perlindungan sosial pada 2024 naik 14,89 persen menjadi Rp 546,9 triliun. Dinilai rentan dipolitisasi di tahun politik.

Sabtu, 17 Juni 2023

Bagikan



## KSP: Anggaran perlinsos 2024 naik, besaran bantuan bisa bertambah

01 Juli 2023 08:00 WIB

**BREAKING NEWS** Jampak Pesan JK ke Saudagar Muslim: Tiru Pengusaha China! Pemkot Bontang Daftarkan 34.782 Pekerja Jadi Peserta BPJS Ketenagakerja

Home > Ekonomi > Apbn

### Anggaran Perlindungan Sosial 2024 Hampir Rp500 Triliun, Fokus ke Kemiskinan Ekstrem

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan **Sri Mulyani Indrawati** mengumumkan anggaran untuk **perlindungan sosial** atau perlinsos pada 2024 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (**RAPBN**) akan mendekati nilai Rp500 triliun.

"Perlindungan sosial tahun depan mencapai Rp493,5 triliun, nilainya hampir setara dengan saat terjadi pandemi Covid-19 yang sangat dahsyat, senilai Rp498 triliun," ujarnya saat menyampaikan Konferensi Pers: RAPBN dan Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8/2023).

## KENAIKAN ANGGARAN BANSOS

# RISIKO DALAM PENYALURAN BANSOS

### RISIKO KEBIJAKAN

- ✓ Tidak terdapat SOTK di Pemda untuk pengelolaan data
- ✓ Tidak teralokasikannya anggaran pengelolaan data secara memadai
- ✓ Kebijakan perluasan penyaluran bansos (penambahan jumlah KPM) tidak berdasarkan angka kemiskinan di masing-masing kab/kota

### RISIKO KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- ✓ Tidak terdapat peraturan yang memadai yang mengatur feedback data hasil penyaluran dengan DTKS
- ✓ Perjanjian Kerjasama Penyaluran dengan Bank/Lembaga Penyalur belum menunjukkan kondisi riil proses bisnis penyaluran bansos

### RISIKO KOORDINASI ANTAR LEMBAGA

- ✓ Rekonsiliasi penyaluran antara Pusat, Daerah, dan Bank Penyalur belum seluruhnya dilakukan
- ✓ Tim Koordinasi Penyaluran Bansos belum sepenuhnya berfungsi

### RISIKO SISTEM INFORMASI

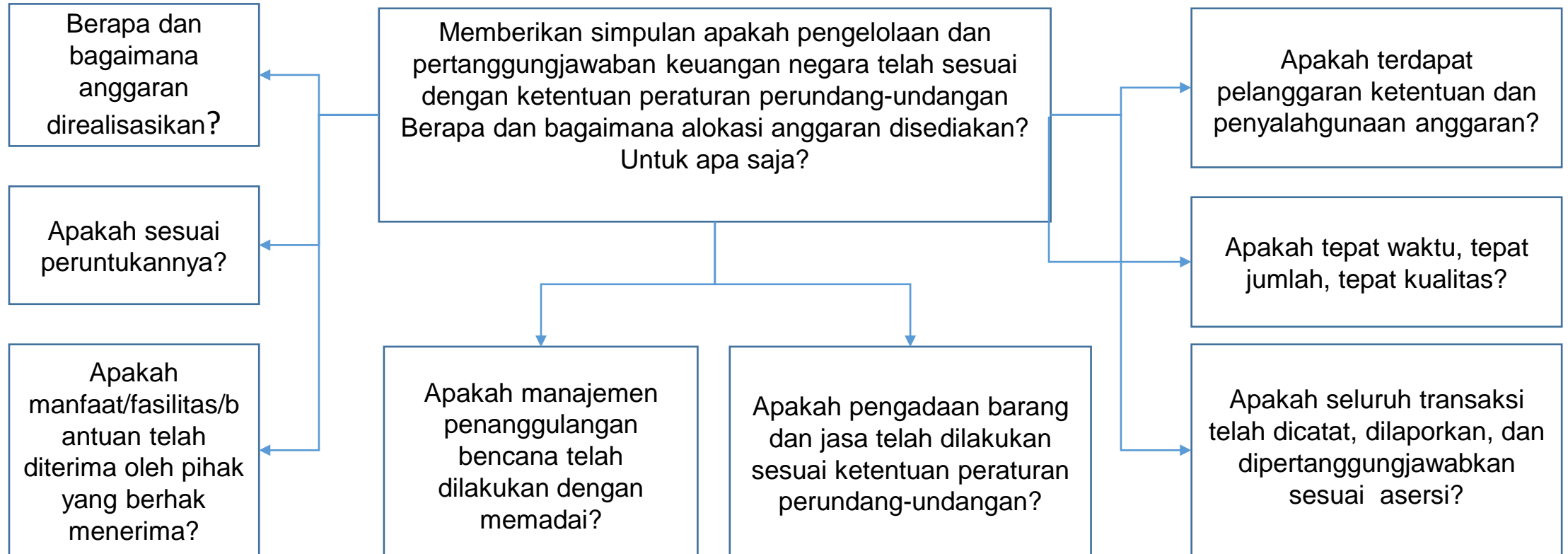
- ✓ Dashboard penyaluran belum sepenuhnya realtime
- ✓ Masih terdapat daerah dengan keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet belum optimal, belum ada listrik, jaringan bank dan mesin EDC dan kondisi geografis yang sulit di beberapa daerah,

### RISIKO PROSES BISNIS

- ✓ Penetapan kuota bansos yang tidak didukung perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan
- ✓ Penetapan dan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran
- ✓ Belum terdapat perbaikan data KPM Bansos bermasalah sehingga masih tersalur bansos pada periode berikutnya

# PERAN BPK DALAM MITIGASI RISIKO PENYALAHGUNAAN BANSOS

Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu



# Praktik Modus Penyalahgunaan Bansos

## Duh! Sri Mulyani Ungkap Praktik Timses Politik Terima Bansos

NEWS - Arrijal Rachman & Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

Sri Mulyani menyebut, manipulasi data penerima bansos dilakukan oleh oknum pemda adalah dengan memasukkan nama pendukung atau bahkan tim suksesnya (timses). Padahal mereka bukan termasuk masyarakat dalam kategori miskin.

### Baca: Ampun! Sri Mulyani Sebut Ada Orang Miskin RI 'Jadi-jadian'

Nama-nama tersebut dimasukkan oleh oknum pemda untuk menerima bansos, karena mereka berjasa dalam memberikan suara di pemilihannya.

"Pemda akan memilih 'keluarga miskin' yang memberikan suara (dukungan) kepada mereka, padahal mereka (penerima bansos ini) tidak benar-benar miskin," jelas Sri Mulyani dalam acara World Bank's Indonesia Poverty Assessment di Jakarta kemarin, dikutip Rabu (10/5/2023).

## Dugaan korupsi bansos beras gunakan modus 'konsorsium' - mengapa program bantuan kemanusiaan disebut 'area rawan korupsi'?

### Berita Utama

Palestina: Israel dituduh gunakan bom fosfor putih, ribuan tewas di Gaza  
6 jam yang lalu

'Hamis bukan pemerintah

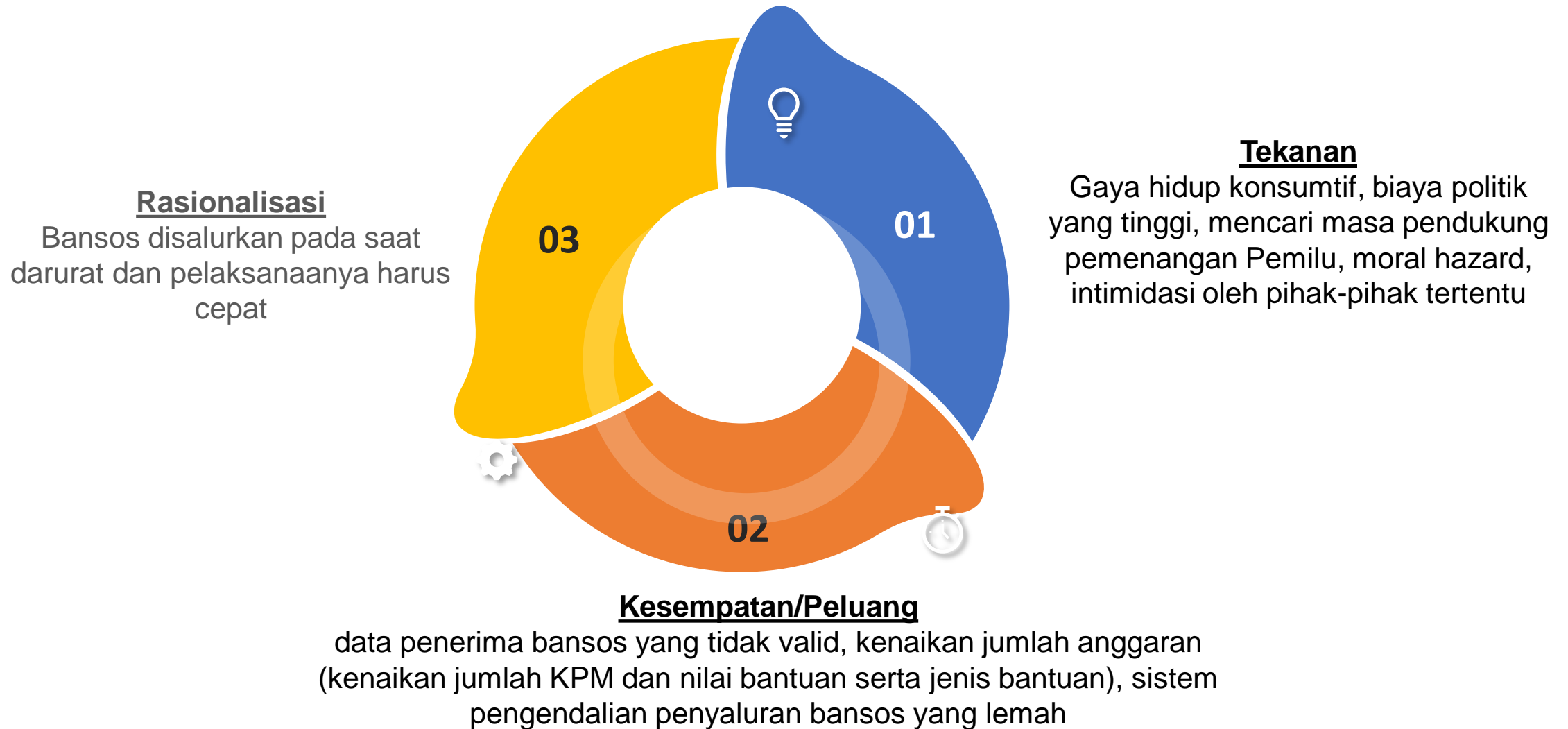
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap para tersangka membuat "satu konsorsium sebagai formalitas" yang ternyata "tidak pernah sama sekali" melakukan kegiatan distribusi bansos yang diberikan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 itu.

## KPK Ungkap Ada Modus TPPU Catut Penerima Bansos Jadi Pemilik Perusahaan

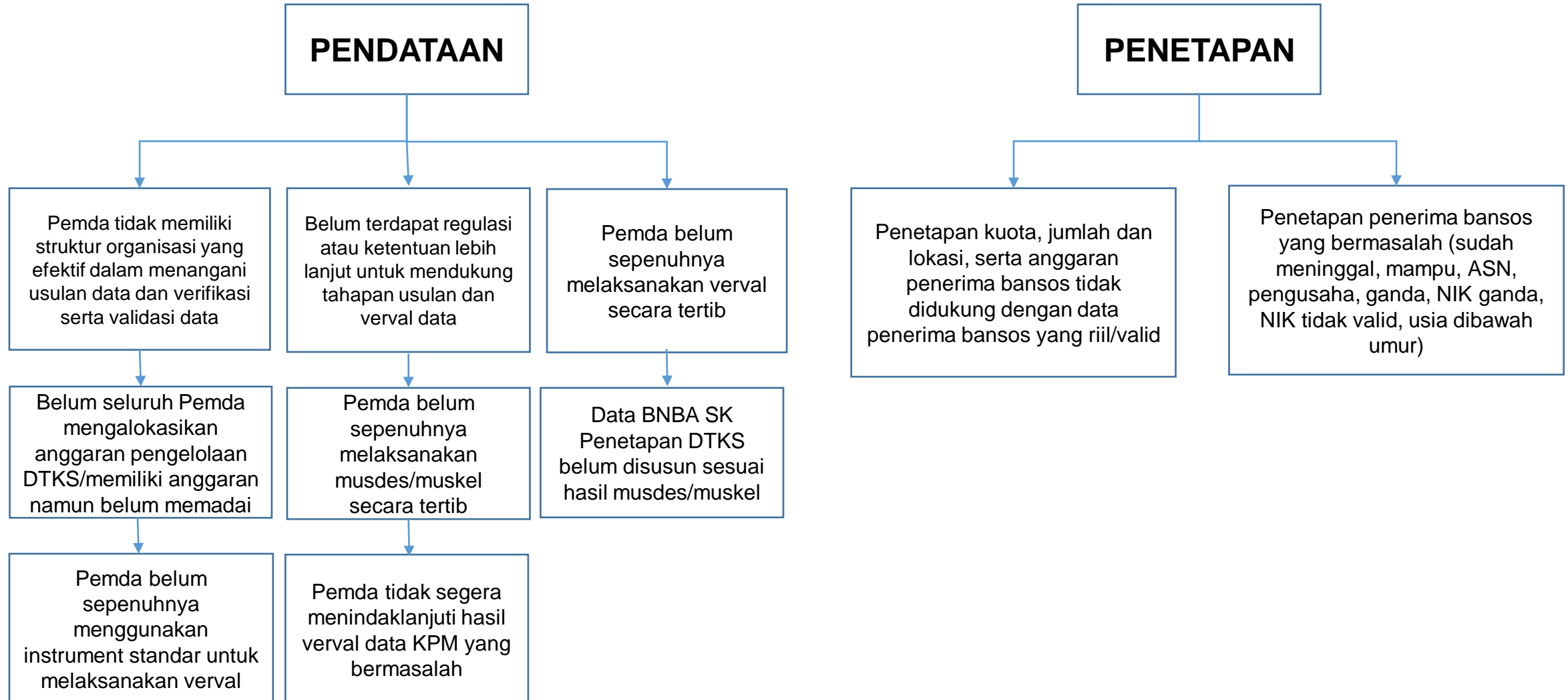
Jakarta - KPK mengungkap ada kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang memanfaatkan penerima bansos. KPK menyebut nama penerima bansos dicatut sebagai pemilik atau komisaris perusahaan.



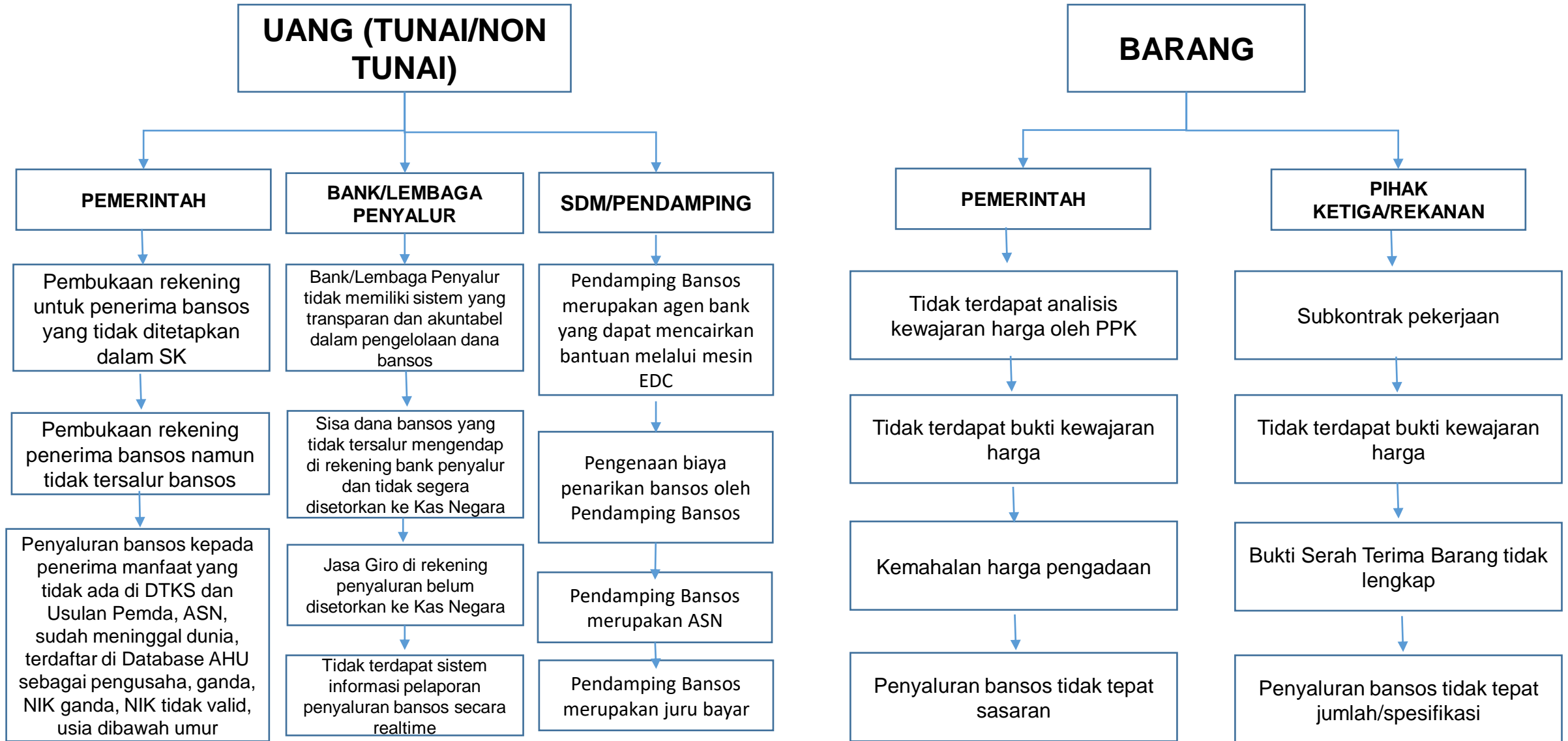
# BANSOS RAWAN DIKORUPSI???



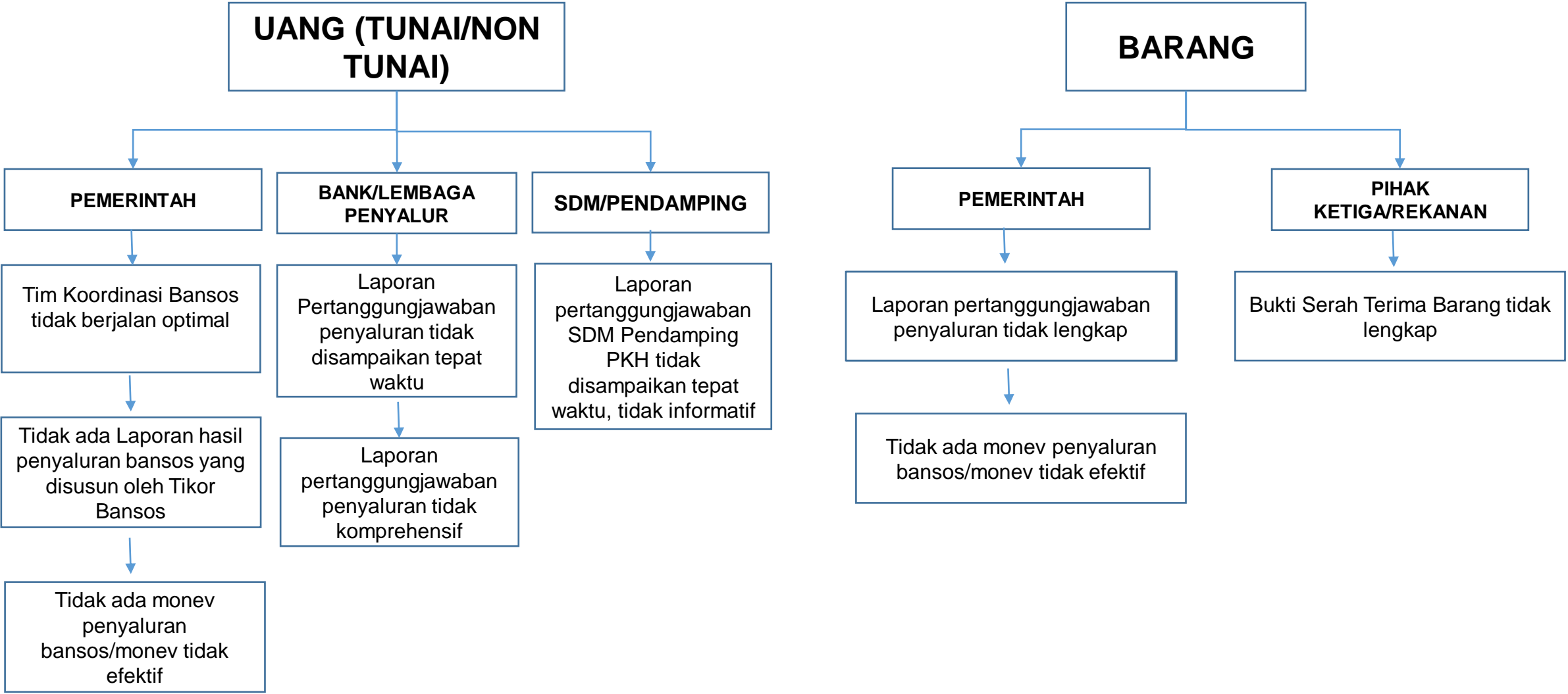
# PERMASALAHAN TAHAPAN PERENCANAAN BANSOS



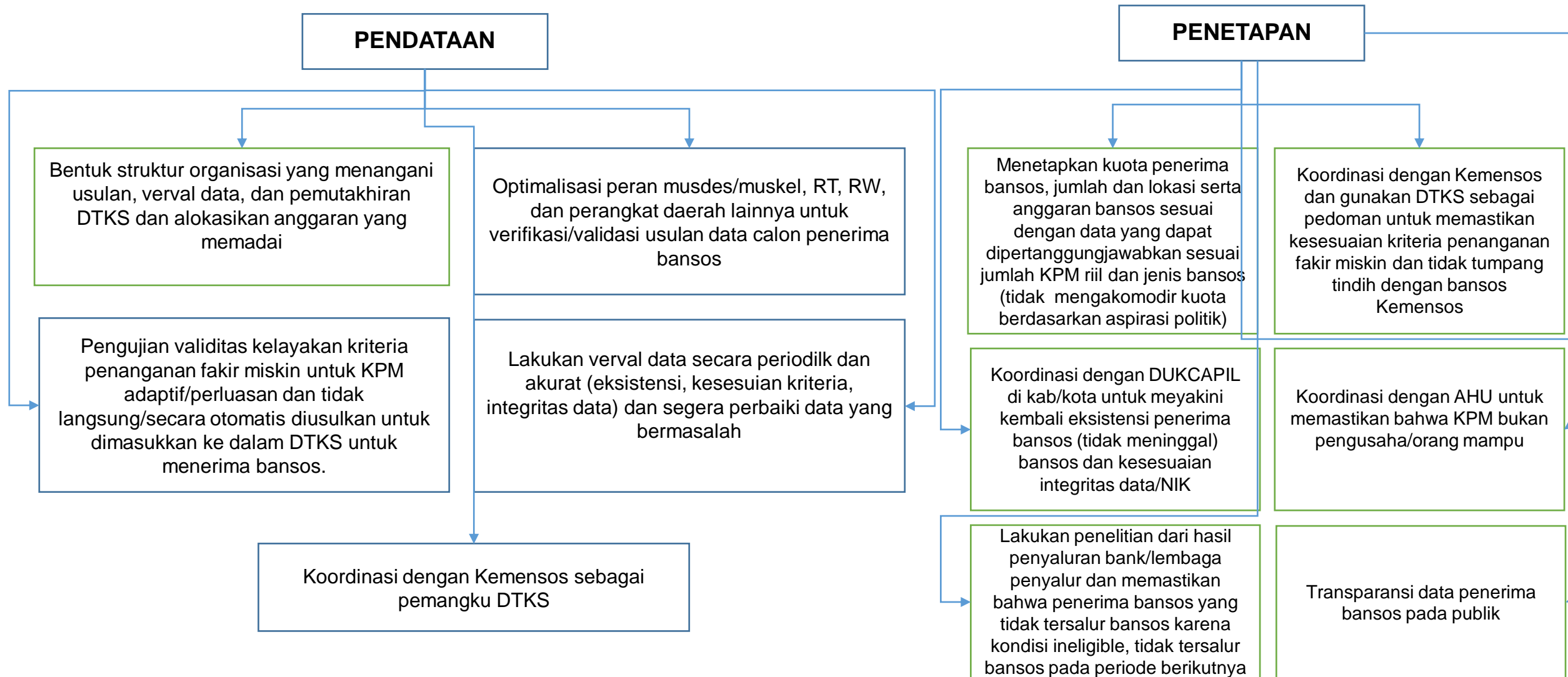
# PERMASALAHAN TAHAPAN PENYALURAN BANSOS



# PERMASALAHAN TAHAPAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONEV BANSOS

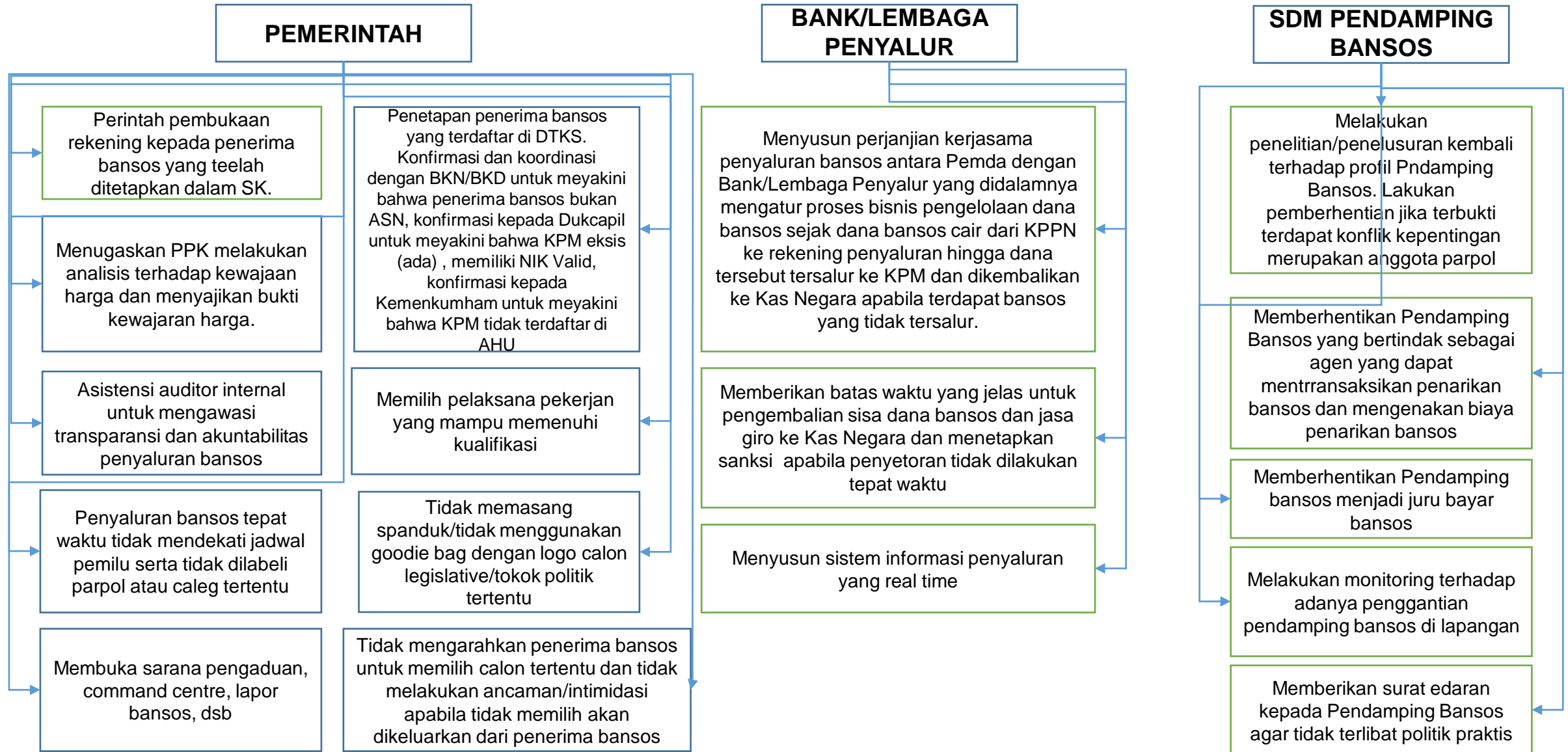


# STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN BANSOS TAHAP PERENCANAAN





# STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN BANSOS TAHAP PENYALURAN



# STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN BANSOS TAHAP PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONEV

## PERTANGGUNGJAWABAN



## TERTIB ADMINISTASI



Pertanggungjawaban penyaluran bansos dari 3 pihak, yaitu Pemda sebagai Tim Koordinasi Bansos, Bank/Lembaga Penyalur, SDM Pendamping Bansos disampaikan secara informatif, akurat, sesuai kondisi riil dan tepat waktu.

## MONITOING DAN EVALUASI



- ✓ Menetapkan SOP Monev Penyaluan Bansos dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk monev bansos
- ✓ Melakukan monev secara rutin dan efektif
- ✓ Monev mengidentifikasi kelemahan/permasalahan penyaluran bansos dan memberikan upaya/solusi penyelesaian permasalahan bansos
- ✓ Asistensi auditor internal dalam pencegahan penyalahgunaan penyaluran bansos
- ✓ Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penyaluran Bansos

# CONCLUSION



1. Pendataan merupakan faktor krusial dalam penyalahgunaan bansos sehingga diperlukan kolaborasi yang intensif antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat untuk memproduksi data terpadu yang valid.
2. Penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan monitoring evaluasi bansos serta optimalisasi peran APIP dan Aparat Penegak Hukum untuk pencegahan penyalahgunaan bansos.
3. Tingkatkan awareness masyarakat melalui edukasi penyaluran bansos dan lakukan penindakan tegas sesuai hukum yang berlaku kepada pihak-pihak yang memiliki *conflict of interest* dan terbukti melakukan penyalahgunaan bansos.

THANK YOU